

**PENDIDIKAN DASAR DAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN :
HARAPAN DAN MASALAHNYA**

MAKALAH

**Disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Pendidikan :
Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia Melalui
Wajib Belajar 9 Tahun Dalam Menyongsong PJPT II
Bandung, Tgl. 7 Agustus 1993**



PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

SUMBER/HARGA

KOLEKSI

NO INVENTARIS

KLASIFIKASI

22-2-95

he

KKI

497/1995-1/12

372.01 Jam

Oleh:

DRS. JAMARIS, M.Pd

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
P A D A N G
1 9 9 3**

PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat izinNya makalah ini dapat jua diselesaikan, atas permintaan pengurus Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) cabang Kabupaten Bandung. Makalah disampaikan dalam kegiatan ilmiahnya untuk meningkatkan kualitas anggota yang berada dalam wilayahnya.

Berdasarkan tema dan topik yang diberikan pada saya, maka penulis melahirkan dalam bentuk judul : PENDIDIKAN DASAR DAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN: HARAPAN DAN MASALAHNYA. Di sini diungkapkan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui penciptaan situasi dan kondisi pendidikan yang mengarah pada tujuan tersebut. Wajib belajar 9 tahun yang akan dicanangkan pemerintah pada bulan Mei 1994 yang akan datang adalah memiliki berbagai harapan dan masalah, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Mengingat makalah ini merupakan pembuka jalan dalam memperlihatkan sosok dari pendidikan dasar dan wajib belajar 9 tahun, maka penulis mengemukakan alternatif pemecahan masalah yang akan di temui dalam pelaksanaannya. Pemecahan itu, hanya merupakan lontaran ide yang memerlukan diskusi lebih lanjut. Penulis sangat berharap masukan dari peserta pertemuan ini untuk menindak lanjuti harapan itu. Agar pelaksanaan wajib belajar 9 tahun sebagaimana kita inginkan bersama dapat tercapai.

Lontaran pikiran ini, hendaknya bermanfaat bagi peserta khususnya dan bagi pengembangan pendidikan kita umumnya. Melalui tulisan ini, penulis menyampaikan terima kasih pada pengurus ISPI yang telah memberi kepercayaan dalam menganalisis topik yang di berikan pada penulis.

Bandung, 7 Agustus 1993

Penulis.

BAB I PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia saat ini bukan sekedar menjadi isu nasional, melainkan telah menjadi program yang dicanangkan oleh MPR dalam GBHN 1988 tersebut, dinyatakan bahwa peningkatan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia merupakan sasaran utama dari pembangunan jangka panjang tahap kedua. Jadi mulai pembangunan jangka panjang tahap kedua, yang akan dimulai tahun 1994, sasaran utama pembangunan nasional akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia.

Perhatian terhadap upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia ini sangat beralasan sekali, karena pemerintah dan semua bangsa Indonesia menyadari bahwa dengan meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia itulah negara kita dapat menjadi negara maju. Kita menyadari bahwa bangsa-bangsa lain yang telah maju, seperti Jepang, Amerika Serikat, Eropa Barat, bahkan Korea Selatan, Taiwan, dan lain-lain, telah mengalami kemajuan pesat karena didukung oleh manusia-manusianya yang berkualitas. Oleh karena itu, maka Indonesia pun jika ingin meningkatkan kemajuan negaranya, tidak ada jalan lain selain meningkatkan kualitas manusianya.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa upaya yang paling utama untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia adalah melalui pendidikan. Di dalam GBHN 1988 secara jelas dinyatakan bahwa

tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dengan demikian, agar kualitas manusia Indonesia semakin meningkat, maka taraf pendidikan setiap manusia atau warga negara Indonesia pun harus ditingkatkan.

Perlunya peningkatan taraf pendidikan bangsa Indonesia ini karena pemerintah menyadari bahwa tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih rendah dan belum merata. Indonesia, sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, saat ini dihadapkan kepada suatu dilema yang pelik, yakni di satu pihak perlu upaya untuk pemerataan kesempatan mendapat pendidikan kepada seluruh bangsa Indonesia, di lain pihak berkepentingan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya (Moegiadi, 1992). Tampaknya jalan keluar yang harus diambil oleh pemerintah adalah memadukan keduanya, yakni dengan pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia pemerintah telah mencanangkan program pendidikan dasar sembilan tahun, yang rencananya akan dimulai tahun 1994. Pendidikan dasar yang selama ini berjalan adalah pendidikan dasar enam tahun, yang berarti identik dengan sekolah dasar enam tahun. Dengan pendidikan dasar sembilan tahun seorang warga negara Indonesia setidaknya-tidaknya baru boleh meninggalkan sekolah jika telah mengikuti pendidikan selama sembilan tahun. Dengan kata lain ia baru boleh meninggalkan bangku sekolah jika telah lulus SLTP dan hal itu baru dianggap sebagai pendidikan dasar. Jadi dengan menambah atau

meningkatkan lama waktu pendidikan dasar dari enam menjadi sembilan tahun, maka diharapkan dapat meningkatkan taraf pendidikan bangsa Indonesia yang sekaligus berarti dapat meningkatkan kualitasnya.

Untuk menunjang keberhasilan pendidikan dasar sembilan tahun itu pemerintahpun telah mencanangkan program wajib belajar sembilantahun bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan wajib program belajar sembilan tahun berarti semua warga negara Indonesia harus mengikuti pendidikan dasar selama sembilan tahun. Namun pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun ini tidak semudah yang diduga, karena memerlukan persyatratan-persyaratan pendukung yang tidak mudah. Masih ada berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan sembilan tahun ini yang sedikit banyak akan menghambat bagi pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun tersebut. Jika masalah-masalah tersebut tidak mampu dipecahkan, maka tentunya akan sangat mempengaruhi keberhasilan upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Penulis melalui makalah ini akan membahas masalah-masalah apa saja yang dihadapi program wajib belajar sembilan tahun dan upaya-upaya untuk memecahkannya.

BAB II

WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DAN PERMASALAHANNYA

1. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Awal kebijakan pendidikan dasar sembilan tahun dapat ditelusuri dari pesan yang terdapat dalam GBHN 1988 tentang titik berat pembangunan pendidikan. Dalam GBHN tersebut dinyatakan sebagai berikut :

Titik berat pembangunan pendidikan diletakan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan menengah dalam rangka persiapan perluasan wajib belajar untuk pendidikan tingkat pertama.

Amanat GBHN tersebut menyiratkan tentang perlunya peningkatan pendidikan dan perluasan kesempatan belajar pada tingkat SLTP. Apa yang diharapkan oleh GBHN ini kemudian secara jelas ditampung di dalam undang-undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun SLTP dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut tidak lagi dimasukan pada jenjang pendidikan menengah, melainkan termasuk jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar tidak lagi enam tahun yang berarti tidak lagi identik dengan sekolah dasar enam tahun. Pendidikan dasar yang sekarang dicanangkan adalah sembilan tahun.

Pendidikan dasar sembilan tahun tidak berarti menjadikan sekolah dasar yang tadinya enam tahun menjadi sembilan tahun. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari UU No.2/1989 tentang UUSPN. disebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan sembilan tahun, terdiri atas program pendidikan enam tahun disekolah dasar (SD) dan program pendidikan tiga tahun disekolah lanjutan tingkat pertamam (SLTP). Jadi dalam kebijakan sekarang, pendidikan dasar itu mencakup SD dan SLTP. Dengandemikian seorang peserta didik yang telah menempuh pendidikan SD 6 tahun, belum berarti telah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar. Sebab ia harus melanjutkan selama tiga tahun lagi di SLTP untuk benar-benar dapat disebut telah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.

Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 dinyatakan bahwa pendidikan dasar itu diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Jika kita telaah tujuan pendidikan dasar tersebut di atas mempunyai dua dimensi, yaitu :

- 1). mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat;
- 2). mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.

Dimensi pertama dari tujuan diatas adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat.

Untuk itu melalui pendidikan dasar mereka dibina dan dikembangkan sikap dan kepribadiannya serta ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu hidup sebagai anggota masyarakat yang baik. Hal ini pun mempunyai kaitan pula dengan dunia kerja. Sebagian besar tenaga kerja di sektor formal dan informal di Indonesia adalah lulusan sekolah pendidikan dasar (pendidikan dasar enam tahun). Dengan meningkatkan pendidikan dasar menjadi sembilan tahun, maka akan diperoleh lulusan pendidikan dasar yang lebih bermutu yang selanjutnya berarti tersedia tenaga-tenaga kerja yang lebih bermutu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar yang memadai. Sementara itu dilihat dari segi perkembangan pribadi, lulusan pendidikan dasar sembilan tahun tentunya akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan segala tuntutan sosial, jika dibandingkan dengan lulusan pendidikan dasar enam tahun.

Dimensi kedua dari tujuan pendidikan dasar sembilan tahun adalah mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan. Dengan pendidikan dasar sembilan tahun akan lebih diperoleh dasar yang lebih mantap bagi peserta didik untuk melanjutkan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi (ke jenjang pendidikan menengah). Dengan kata lain, pendidikan dasar sembilan tahun akan lebih memberikan dasar yang kokoh bagi pendidikan lebih lanjut.

Untuk mencapai tujuan pendidikan dasar tersebut di atas, maka kurikulum yang dirancang untuk pendidikan dasar disamping harus dapat menumbuhkan dan mengembangkan

pribadi peserta didik, juga sebaiknya dititikberatkan pada penguasaan ketrampilan dasar (baca-tulis-hitung) dan pengetahuan dasar yang meliputi pengetahuan dan ketrampilan yang berhubungan dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan pendidikan agama.

Peningkatan pendidikan dasar menjadi sembilan tahun tidak dapat disangkal merupakan suatu upaya tepat untuk meningkatkan taraf pendidikan semua warga negara Indonesia yang sekaligus berarti meningkatkan kualitas diri dan kehidupannya. Jika semua warga negara Indonesia diharapkan akan menjadi warga negara atau manusia yang berkualitas seperti yang digambarkan oleh GBHN 1988, yakni : manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, cerdas, terampil serta sehat jasmani dan rohani, cinta tanah air, dan memiliki semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial.

Memang idealnya untuk lebih meningkatkan kualitas bangsa Indonesia, pendidikan yang paling rendah yang harus diikuti setidaknya selama dua belas tahun, yakni setingkat SMTA/pendidikan yang sederajat. Namun karena keterbatasan kemampuan negara kita, maka tingkat pendidikan yang paling rendah yang harus diikuti tersebut baru pada pendidikan dasar sembilan tahun. Meskipun demikian suatu saat nanti batas terendah tingkat pendidikan warga negara Indonesia secara bertahap harus

ditingkatkan menjadi dua belas tahun (setingkat SMTA). Hal ini pun akan sangat bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program pendidikan dasar sembilan tahun yang akan kita laksanakan.

Keberhasilan melaksanakan pendidikan dasar sembilan tahun tidak sekedar cukup dengan menggabungkan SD 6 tahun dan SLTP 3 tahun, melainkan program tersebut harus dirancang dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya kurikulumnya harus merupakan satu kesatuan dan dengan isi yang baik; sarana dan prasarana yang mendukung, proses belajar-mengajar yang baik, serta pengelolaan pendidikan yang baik dan terpadu.

2. Pendidikan Dasar dan Wajib Belajar Sembilan Tahun

Pendidikan dasar sembilan tahun dan wajib belajar adalah dua konsep yang berbeda dan tidak perlu dicampuradukan (Hoegiadi, 1992). Sebab untuk suatu masyarakat tertentu pendidikan dasar dapat diselenggarakan tanpa wajib belajar. Indonesia pun pernah melaksanakan pendidikan dasar (enam tahun) dengan tidak diikuti wajib belajar, yakni sebelum tanggal 2 Mei 1984. Namun tampaknya bagi Indonesia, sekarang ini pendidikan dasar mempunyai kaitan yang begitu erat dengan wajib belajar. Pendidikan dasar di Indonesia sejak 2 Mei 1984 telah diikuti dengan kebijakan wajib belajar.

kebijakan wajib belajar.

Mendukung program pendidikan dasar dengan wajib belajar bagi Indonesia memang dirasakan sangat perlu. Hal ini karena tidak semua bangsa Indonesia mau secara sadar menyekolahkan anak-anaknya sampai menyelesaikan pendidikan dasar. Mungkin karena satu dan lain hal mereka lebih baik tidak menyekolahkan anaknya atau menyuruh berhenti sekolah sebelum mereka menamatkan pendidikan dasar. Jika hal itu terjadi, maka tentu peningkatan kualitas pendidikan bangsa Indonesia akan terhambat. Oleh karena itu tepat sekali jika ada kebijakan wajib belajar pendidikan dasar yang berarti semua warga negara diwajibkan untuk mengikuti pendidikan serendah-rendahnya sampai menyelesaikan pendidikan dasar.

Kebijakan pendidikan dasar sembilan tahun memang tepat sekali segera diikuti oleh kebijakan wajib belajar sembilan tahun, yang akan dimulai pada pertengahan tahun 1994 nanti. Jika kebijakan pendidikan dasar sembilan tahun tidak diikuti dengan wajib belajar sembilan tahun, maka ada kakhawatiran tidak semua warga negara Indonesia mau menyempatkan diri mengikuti pendidikan sampai tingkat SLTP. Mungkin saja mereka sudah merasa puas dengan hanya menyelesaikan SD enam tahun.

Dengan wajib belajar sembilan tahun nanti berarti semua warga negara Indonesia harus mengikuti pendidikan serendah-rendahnya selama sembilan tahun, yang berarti harus menamatkan pendidikan dasar sembilan tahun (tingkat SLTP). Jadi dengan wajib belajar sembilan tahun, setiap

warga negara Indonesia diharuskan untuk menempuh pendidikan sampai selesai SLTP. Dengan wajib belajar sembilan tahun maka diharapkan akan menunjang keberhasilan program pendidikan dasar sembilan tahun.

3. Masalah-masalah dalam Pelaksanaan

Dengan kebijakan wajib belajar sembilan tahun berarti semua warga negara yang berusia 6 - 15 tahun akan mengikuti jenjang pendidikan dasar sembilan tahun. Mungkin mereka akan memasuki/melanjutkan ke SLTP sekitar 27 juta (lihat Moegiadi, 1992). Jika semua atau sebagian besar bersedia melanjutkan ke jenjang SLTP, tentu bukanlah sesuatu yang mudah untuk menanganinya, meskipun tentunya hal itu merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan.

Ada berbagai permasalahan yang tampaknya mengganggu keberhasilan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun ini, antara lain meliputi : (a) kemampuan ekonomi dan kesadaran orang tua yang rendah; (b) keterbatasan anggaran biaya; (c) keterbatasan prasarana dan sarana; (d) penyebaran peserta didik di daerah terpencil, nomadik, dan yang berkelainan; (e) penyebaran guru yang tidak merata; dan (f) laju mengulang kelas dan putus sekolah.

a) Kemampuan dan Kesadaran Orang Tua Rendah.

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menuntut partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus SLTP. Untuk memasukkan

anak-anaknya ke SD dan SLTP berarti diperlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap orang tua. Dari berbagai penelitian ditemukan bukti bahwa ternyata banyak anak putus sekolah dasar dan yang tidak dapat melanjutkan ke SLTP adalah karena faktor kemampuan ekonomi orang tua yang rendah. Hal ini berarti bahwa sebagian orang tua tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai menyelesaikan pendidikan dasar sekalipun. Dengan demikian kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pun akan terhambat jika kemampuan ekonomi masyarakat sangat rendah untuk mampu menyekolahkan anak-anaknya.

Selain itu, yang juga dapat mengganggu keberhasilan wajib belajar sembilan tahun adalah faktor kesadaran atau kemampuan orang tua untuk mau menyekolahkan anak-anaknya. Tidak berarti orang tua yang mampu dari segi ekonomi mau menyekolahkan anak-anaknya sampai ke SLTP, jika tidak disertai dengan kesadaran dan kemauan. Propinsi Jawa Barat misalnya dari segi kemampuan ekonomi lebih tinggi dari propinsi-propinsi lain, tetapi ternyata Jawa Barat menduduki urutan yang sangat rendah dalam kemampuan masyarakatnya untuk menyekolahkan anak-anaknya ke SLTP. Tampaknya perlu ada suatu penelitian untuk menemukan faktor-faktor lain di luar faktor ekonomi (misalnya faktor budaya) yang menyebabkan orang tua tidak mau menyekolahkan anak-anaknya sampai selesai SLTP.

b) Keterbatasan Anggaran Biaya

Penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun di seluruh Indonesia tentu memerlukan anggaran biaya yang sangat besar, apalagi jika wajib belajar berhasil menggiring peserta didik untuk terus melanjutkan ke SLTP. Memang harus diakui bahwa anggaran biaya pendidikan dari APBN setiap tahun selalu meningkat. Namun jumlah rata-rata anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia masih di bawah rata-rata anggaran pendidikan masyarakat di negara-negara Asia-Pasifik yang telah maju. Terbatasnya anggaran biaya tentu akan sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun.

c) Keterbatasan Prasarana dan Sarana

Wajib belajar SD 6 tahun yang dicanangkan pada tahun 1984 yang lalu menunjukkan keberhasilan yang gemilang dengan meningkatnya angka partisipasi masuk SD yang sangat tinggi. Tampaknya dengan wajib belajar sembilan tahun juga akan meningkatkan angka partisipasi peserta didik untuk masuk SLTP yang tinggi pula. Tingginya angka partisipasi ini tentunya akan menuntut tersedianya prasarana seperti ruang-ruang kelas baru di SLTP untuk menampung lulusan SD. Selain itu juga akan menuntut lebih banyak lagi sarana belajar seperti buku pelajaran, buku bacaan, dan perpustakaan terbatasnya prasarana dan sarana belajar yang tersedia, tentu akan

mempengaruhi keberhasilan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

d) Penyebaran Peserta Didik.

Berkaitan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata, maka penyebaran peserta didik pun tidak merata. Masih banyak peserta didik yang tempat tinggalnya di desa-desa terpencil, di pulau-pulau terpencil, yang selalu berpindah-pindah (nomaden), yang hidupnya di atas perahu (suku laut), dan juga mereka yang tinggalnya tidak menentu di kota-kota (di tempat yang kumuh dan miskin). Dengan wajib belajar sembilan tahun mereka pun harus mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun sampai tamat SLTP. Namun tentunya dengan kondisi seperti itu, akan sangat menyulitkan penyelenggaraan pendidikan dasarnya jika harus dilakukan dengan sekolah biasa (konvensional), sehingga perlu upaya lain untuk mengatasinya.

e) Penyebaran Guru yang Tidak Merata

Faktor guru tentu merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung wajib belajar sembilan tahun. Namun jika penyebaran guru tidak merata, dimana ada satu daerah yang kelebihan guru sementara daerah yang kelebihan guru sementara daerah lain kekurangan, maka tentu akan mengganggu keberhasilan penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun. Memang harus diakui bahwa kondisi penyebaran guru di Indonesia belum merata. Di daerah perkotaan guru SD dan SLTP itu bertumpuk

(khususnya di pulau Jawa), sementara di desa-desa dan terutama di daerah terpencil sangat kekurangan guru.

Penelitian oleh Dedi Supriadi (1992) memperkuat bukti ini. Ia meneliti tentang penyebaran guru-guru SD di Jawa Barat. Hasil penelitannya menunjukkan ada kabupaten tertentu di Jawa Barat yang surplus guru SD, seperti Tangerang dan Bekasi sangat kekurangan guru SD. Jika di Jawa Barat saja sudah tidak merata, apalagi penyebaran guru di luar Jawa.

f) Laju Mengulang Kelas dan Putus Sekolah

Laju mengulang kelas di SD antara tahun 1984-1985 sekitar 9,5 % setiap tahun. Angka ini jelas masih agak tinggi. Sedangkan di SLTP berkisar 0,1 % yang merupakan angka yang relatif rendah. Sementara itu angka putus sekolah di SD sekitar 3,5 % dan di SLTP 3% (Moegiadi, 1992). Angka putus sekolah dan mengulang kelas menunjukkan tingkat efisiensi yang belum terlalu memadai di dalam sistem pendidikan dasar kita. Laju mengulang kelas dan putus sekolah yang masih agak tinggi (khususnya di SD) akan menjadi kendala untuk meningkatkan angka partisipasi nyata di SD maupun di SLTP.

Selain masalah-masalah yang dikemukakan di atas, mungkin masih ada masalah-masalah lain yang dapat menjadi kendala bagi penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun. Mungkin saja untuk setiap daerah menghadapi masalah yang berbeda-beda. Pada bagian

berikut penulis akan mencoba untuk mencari alternatif pemecahan masalahnya.

4. Alternatif Pemecahan

Untuk mencari permasalahan pertama yang menyangkut keterbatasan kemampuan dan kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai selesai pendidikan dasar sembilan tahun memang tidak mudah, namun juga bukan sesuatu yang mustahil untuk diatasi. Bagaimanapun orang tua mengalami kesulitan ekonomi, tentu partisipasi mereka dalam pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun tetap harus ada. Oleh karena itu perlu upaya pemecahannya.

Berkaitan dengan masalah keterbatasan ekonomi orang tua anak, maka berbagai alternatif pemecahannya perlu dilakukan, antara lain : a) meringankan atau sama sekali membebaskan SPP, b) lebih banyak bea siswa untuk anak-anak yang ekonominya tidak mampu, c) menggalang orang tua asuh pada setiap lingkungan masyarakat, d) memperbanyak SMP terbuka atau kejar paket A dan B bagi peserta didik yang terpaksa sudah harus bekerja untuk membantu orang tuanya, dan e) melibatkan partisipasi masyarakat (misalnya LSM atau organisasi massa) untuk menyediakan pendidikan dasar yang murah atau cuma-cuma.

Sedangkan untuk mengatasi masalah rendahnya kesadaran atau kemauan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus SLTP, perlu upaya-upaya untuk membina kesadarannya. Misalnya dengan memberikan penyuluhan dan

memotivasi para orang tua untuk berpartisipasi dalam program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Upaya ini bisa dilakukan oleh pemerintah (melalui departemen pendidikan dan kebudayaan, departemen penerangan, dsb), organisasi massa, tokoh-tokoh masyarakat (seperti ulama, kepala desa, guru, dsb), dan lain-lain. Oleh karena itu perlu ada kerjasama antar berbagai pihak untuk menyukseskan wajib belajar ini. Dengan memotivasi orang tua anak diharapkan tumbuh kesadaran mereka untuk mau menyekolahkan anak-anaknya sampai selesai SLTP.

Untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran biaya dari pemerintah memang perlu ada keberanian dari pemerintah sendiri untuk menaikkan anggaran pendidikan pada RAPBN-nya. Setidak-tidaknya anggaran pendidikan kita bisa sama dengan rata-rata anggaran pendidikan negara-negara Asia-Pasifik yang telah maju. Selain itu perlu digalang dana-dana pendidikan dari masyarakat, misalnya melalui BP3, organisasi massa, dan lain-lain. Namun bertambahnya anggaran atau dana pendidikan tidak begitu saja menjamin keberhasilan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan dasar jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Misalnya karena kekurangmampuan pengelolaan, maka banyak anggaran pendidikan di lembaga pendidikan memiliki pemerintah yang tersisa dan tidak termanfaatkan.

Masalah terbatasnya sarana dan prasarana dapat diatasi dengan membangun dan menyediakan sarana dan prasarana

yang baru. Misalnya dengan membangun lokal-lokal baru di SLTP atau mendirikan gedung sekolah baru sampai ke pelosok terpencil. Keterbatasan sarana pelajaran seperti buku-buku pelajaran dan buku-buku bacaan dapat diatasi dengan mencetak buku-buku bacaan dapat diatasi dengan mencetak buku-buku yang murah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta menyediakan buku-buku di perpustakaan. Bantuan dari masyarakatpun perlu digalakkan untuk membantu penyediaan prasarana dan sarana belajar itu.

Penyebaran peserta didik yang tidak merata, terpencil, nomaden, yang hidup di laut, dan anak-anak gelandangan di kota memang cukup pelik untuk diatani. Ada berbagai alternatif pemecahan yang mungkin bisa mengatasi, misalnya: a) mendirikan SD kecil dengan sistem multi kelas, b) memperbanyak SMP terbuka, c) menyebarkan kejar Paket A dan B, d) merintis model "guru kunjung", dan e) menyediakan pendidikan yang mengambil basis rumah sebagai tempat belajar.

Penyebaran guru tidak merata juga merupakan masalah yang pelik. Bertumpuknya guru-guru di suatu kota atau daerah bisa disebabkan oleh berbagai hal, misalnya karena ingin bertugas di daerah asalnya, ingin dekat dengan orang tua, mengikuti suami, ingin melanjutkan pendidikan, dan mungkin karena keengganan bertugas di daerah-daerah terpencil. Penyebaran guru yang tidak merata ini jelas sangat merugikan bagi daerah-daerah yang kekurangan guru, misalnya daerah-daerah terpencil. Upaya untuk mengatasinya

antara lain : a) pemerintah mengangkat guru-guru baru untuk mengisi kekurangan guru, terutama diangkat dari putra daerah, sehingga diharapkan mereka tidak minta pindah, b) memutasikan guru-guru yang sudah ada dari daerah yang kelebihan ke daerah yang kekurangan, c) memberikan tunjangan khusus atau insentif yang besar bagi guru-guru yang mau ditempatkan di daerahterpencil dan mempermudah kenaikan pangkat (kemajuan karier) mereka.

Sementara itu untuk mengatasi angka mengukang kelas yang cukup tinggi perlu peningkatan kemampuan para guru untuk dapat melakukan tindakan diagnostik dan perbaikan (remedial) terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Selain itu juga perlu ditekankan pada orang tua untuk mengendalikan anak-anaknya untuk tidak sering meninggalkan sekolah. Laju putus sekolah dapat ditekan misalnya dengan mendekatkan peserta didik pada tempat-tempat belajar dengan cara menambah gedung sekolah, ruang kelas, dan guru. Disamping itu juga membina kesadaran para orang tua untuk tidak mencabut anaknya dari sekolah sebelum mereka selesai SLTP.

Demikianlah beberapa hal yang merupakan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh program wajib belajar sembilan tahun. Dengan menyadari masalah dan alternatif pemecahannya, maka diharapkan program wajib belajar pendidikan dasara sembilan tahun akan berhasil dengan baik.

BAB III

PENUTUP

Kebijakan wajib belajar sembilan tahun merupakan sebuah upaya mulia untuk mengangkat taraf pendidikan bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan mutu atau kualitas bangsa Indonesia sendiri. Meskipun berbagai permasalahan muncul menjadi kendala bagi keberhasilan program wajib belajar ini, namun tidak perlu harus menyebabkan program tersebut terhenti. Sambil terus berjalan masalah-masalah yang dapat menghambat sedikit-demi sedikit diatasi dan segala kekurangan serta kelemahan diperbaiki.

Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun hanya akan berhasil dengan baik jika diselenggarakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah dan dukungan partisipasi keluarga dan masyarakat. GBHN mengingatkan kita bahwa tanggung jawab pendidikan bangsa Indonesia itu terletak di tangan pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Sementara itu kebijakan pendidikan dasarnya sendiri hanya akan berhasil jika direncanakan dan diselenggarakan dengan baik, yang menyangkut kurikulum proses belajar-mengajar, guru-guru yang berkualitas dan pengelolaan program yang baik pula.

DAFTAR BACAAN

- Dedi Supriadi (1992), Potret Penyebaran Guru SD di Jawa Barat, Mimbar Pendidikan, No. 1 Tahun XI, April 1992.
- Ibrahim (1992), Kesenambungan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar 9 Tahun, Mimbar Pendidikan, No. 1 Tahun XI April 1992.
- Jamil Bakar (1989), Pokok-pokok Pikiran tentang Pendidikan Dasar, Mimbar Pendidikan, No. 3 tahun VIII September 1992.
- Moegiadi (1992), Dilema antara Perluasan Kesempatan Belajar dan Peningkatan Mutu Pendidikan, Orasi ilmiah di IKIP Bandung, tanggal 20 Oktober 1992.
- Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.